

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Efektivitas Dan Efisiensi Dana

1. Efektivitas Dana

a. Definisi Efektivitas

Kata efektivitas bisa diartikan sebagai upaya atau tingkat ketercapaian yang dapat dicapai oleh seseorang atau suatu lembaga. Dalam Kamus Bahasa Indonesia, dijelaskan bahwa efektif artinya yaitu adanya efek (akibat, pengaruh, kesan), teratasi dan dapat menerima hasil. Dengan demikian, efektivitas merupakan kesetaraan antara seorang yang melakukan tugasnya dengan tujuan yang ingin dicapai.¹⁸

Berikut ini adalah beberapa pendapat para ahli mengenai efektivitas yaitu diantaranya menurut Agung Kurniawan, menjelaskan efektivitas sebagai kompetensi menjalankan peran dan fungsi (operasional kegiatan) dari sebuah organisasi atau lembaga yang tidak adanya tuntutan atau tekanan dalam penyelenggaraannya. Lalu, Siagian juga mengemukakan bahwa efektivitas itu berkaitan dengan penyelesaian tugas dengan batas waktu yang ditentukan atau dapat dikatakan sebagai penyelenggaraan program yang dapat dicapai selaras dengan tujuan yang telah dirancang sebelumnya. Efektivitas adalah

¹⁸Nurhayati, "Efektivitas Pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019 Di UPTD SD 84 ParePare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)," hal 24.

suatu kondisi atau situasi yang mempunyai arti tentang terwujudnya akibat yang diinginkan.¹⁹

Hidayat juga memberikan definisi bahwa efektivitas adalah suatu ukuran atau tingkat lembaga atau instansi yang memberitahu beberapa banyak target, yaitu jumlah, mutu dan waktu tercapai secara maksimal, dimana semakin tinggi tujuan tercapai maka semakin tinggi tingkat efektivitasnya.²⁰ Efektivitas juga mengacu pada tingkat keberhasilan program di sektor publik sehingga suatu program dapat dianggap efektif jika berpengaruh besar terhadap kualitas layanan bagi masyarakat yang merupakan sasaran yang telah ditentukan.

Maka dari uraian diatas peneliti mendefinisikan bahwa efektivitas adalah suatu tolak ukur atau penilaian terhadap kemampuan pelaksanaan tugas dan fungsi suatu kegiatan, apakah sudah mampu menyelesaikan tujuan sesuai dengan yang direncanakan sebelumnya.

b. Pengukuran Efektivitas Dana

Pengukuran efektivitas bukan perkara yang mudah, karena efektivitas bisa dianalisis dari banyak pandangan dan bergantung kepada siapa yang mengevaluasi dan melaksanakannya. Menurut Yuliasuti, jika output yang dihasilkan terhadap sasaran yang ditetapkan semakin meningkat, maka proses suatu program kegiatan akan lebih efektif. Jadi, dapat disimpulkan bahwa jika ukuran efektivitas semakin

¹⁹Larang, "Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Pengadaan Fasilitas Sekolah Di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Kalosi Kabupaten Enrekang," hal 22-23.

²⁰Shofiana Syam, "Pengaruh Efektivitas Dan Efisiensi Kerja Terhadap Kinerja Pegawai Pada Kantor Kecamatan Banggae Timor," *Jurnal Ilmu Manajemen Profitability* 4, no. 2 (15 Agustus 2020): hal 4, <https://doi.org/10.26618/profitability.v4i2.3781>.

meningkat, maka kemampuan kerja yang telah ditentukan akan semakin baik atau efektif. Tingkatan efektivitas dana juga dapat dinilai dengan membandingkan antara perencanaan yang dibuat dengan realisasi sesungguhnya. Tetapi, jika usaha atau hasil kerja dan perilaku yang dilaksanakan tidak benar sehingga tujuan yang diinginkan tidak tercapai, maka hal tersebut dapat dikatakan tidak efektif.

Menurut Makmur, berpendapat bahwa efektivitas dapat dilihat dari beberapa hal ialah sebagai berikut:

- 1) Ketepatan penentuan waktu, waktu yang dimanfaatkan secara tepat akan memengaruhi tingkat keefektifan dana dari suatu program kegiatan dalam mencapai tujuan.
- 2) Ketepatan perhitungan biaya, hal ini dilakukan supaya dalam melaksanakan kegiatan tidak mengalami kekurangan dalam hal biaya.
- 3) Ketepatan dalam menentukan tujuan, tujuan yang ditentukan secara tepat akan mendukung efektivitas dana dalam pelaksanaan kegiatan tersebut.
- 4) Ketepatan sasaran, aspek ini dapat menetapkan keberhasilan kegiatan individu atau organisasi dalam mencapai tujuan.²¹
- 5) Produktivitas, maksudnya kuantitas produk atau jasa primer yang dihasilkan suatu organisasi.

²¹Firda Akmalia Wardah, "Analisis Tingkat Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID 19 Di Desa Se-Kecamatan Sukorejo," 2021, hal 17.

- 6) Kepuasan kerja, seperti umpan balik positif atau keuntungan positif yang dirasakan seseorang atas tugasnya dalam suatu program kegiatan.
- 7) Integritas, yaitu terdapat komunikasi dan kerjasama yang baik sesama anggota dalam mengatur tindakan.
- 8) Fleksibilitas adaptif, yaitu kompetensi individu atau organisasi untuk beradaptasi terhadap perubahan yang ada.²²

Sharma dalam Tangkilisan juga memberikan penjelasan terkait ciri-ciri atau tingkat efektivitas dalam kegiatan yang berkaitan dengan faktor dari dalam dan dari luar, yaitu antara lain:

- 1) Produktivitas atau hasil.
- 2) Efektivitas program kegiatan dalam wujud ketercapaiannya dalam beradaptasi dengan perubahan-perubahan dari dalam maupun luar kegiatan.
- 3) Tidak terdapat tekanan atau tuntutan dalam kegiatan atau hambatan-hambatan seperti bagian-bagian organisasi.²³

c. Indikator-Indikator Efektivitas Dana

Untuk mengetahui efektivitas dana dari suatu program kegiatan, maka terdapat beberapa indikator-indikator yang dapat dipergunakan untuk mengukur tingkat keefektifitasan kegiatan. Sugiyono dan

²²Hawati, "Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Menunjang Sarana Dan Prasarana Pendidikan," hal 17-18.

²³Larang, "Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Pengadaan Fasilitas Sekolah Di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Kalosi Kabupaten Enrekang," hal 25.

Budiani menjelaskan ada beberapa indikator yang dimanfaatkan untuk mengukur tingkat efektivitas diantaranya adalah sebagai berikut:

1. Ketepatan sasaran atau program

Yakni, seberapa jauh para anggota program kegiatan tepat dalam melaksanakan tugas seperti yang telah ditetapkan sebelumnya. Ketepatan sasaran lebih menitikberatkan pada jangka pendek dan lebih bersifat operasional, penetapan sasaran yang tepat secara individu ataupun sesuai sasaran yang ditetapkan organisasi, sangat menentukan keberhasilan operasional organisasi. Demikian juga, apabila tujuan yang ditetapkan tidak tepat, maka tindakan tersebut akan terhambat untuk dilakukan.

2. Sosialisasi program

Ialah kemampuan melaksanakan program sedemikian rupa, sehingga informasi yang terkait dengan penyelenggaraan program dapat terkomunikasikan dengan baik kepada masyarakat pada umumnya dan kepada peserta khususnya. Menurut Wilcox dalam Mardikonto, pemberian informasi merupakan langkah awal untuk mencapai hasil yang optimal dan dapat memperlancar kelanjutan kegiatan, karena pemberian informasi tersebut dapat digunakan sebagai pengetahuan atau wawasan bagi yang menerima informasi tersebut.

3. Tujuan Program

Yakni, sejauh mana hasil kegiatan sesuai dengan tujuan program yang telah direncanakan sebelumnya. Pencapaian suatu tujuan merupakan suatu usaha yang menyeluruh, pencapaian tujuan

hendaknya dipandang sebagai suatu proses, sehingga diperlukan langkah-langkah oleh yang baik dan benar untuk menjamin keberhasilan tujuan akhir. Adabeberapa penyebab yang dapat memengaruhi tercapainya tujuan yaitu, waktu dan tujuan yang merupakan sasaran yang relevan.

4. Pemantauan Program

Merupakan kegiatan yang dilaksanakan setelah pelaksanaan program kegiatan sebagai suatu fokus dan tindak lanjut kepada peserta program. Pengawasan mencakup pemeriksaan, evaluasi dan perbandingan hasil yang dicapai dengan standar yang telah ditetapkan. Jika hasil yang dicapai tidak memenuhi standar yang ada, maka harus dilakukan tindakan korektif atau memperbaikinya. Pemantauan adalah proses pengamatan terhadap seluruh pelaksanaan program kegiatan untuk memastikan bahwa pekerjaan yang dilakukan berjalan sesuai dengan rencana yang telah disepakati sebelumnya.²⁴

2. Efisiensi Dana

a. Definisi Efisiensi

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia, makna efisiensi adalah potensi dalam melaksanakan tugas dengan benar dan tepat (tanpa membuang waktu, tenaga dan dana). Setiap kegiatan untuk mencapai suatu tujuan, memerlukan efisiensi dalam pelaksanaan pekerjaan agar tujuan dapat dicapai sesuai dengan apa yang sudah dicegah

²⁴ Gusmeri, Dr Zaki Fuad, dan Nila Herawati, "Efektivitas Dana Desa Dalam Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat Di Kecamatan Syiah Kuala Kota Banda Aceh" (2019), hal 22.

sebelumnya. Suatu lembaga pendidikan atau instansi dapat dikatakan beroperasi dengan efisien ketika faktor produksi direalokasikan untuk meningkatkan produksi atau suatu komoditas tanpa mengurangi produksi komoditas lainnya

Berikut adalah beberapa pemaparan pendapat dari beberapa ahli, yaitu efisiensi menurut Stoner adalah tindakan mengoptimalkan hasil dengan menggunakan modal (tenaga ahli, bahan dan peralatan) seminimal mungkin. Efisiensi adalah rasio input terhadap output dan perbandingan input terhadap biaya.²⁵ Kemudian, Hasibuan juga mendefinisikan efisiensi sebagai nilai surplus yang diciptakan suatu organisasi dengan menggunakan masukan berupa tenaga kerja, bahan baku, modal dan lain-lain. Efisiensi dalam produksi juga tidak dapat luput dari alokasi input dalam produksi. Suatu organisasi dapat dikatakan bekerja secara efisien, ketika faktor-faktor produksi direalokasikan guna untuk meningkatkan produksi suatu komoditas tanpa mengurangi produksi barang yang lain.²⁶

Sedarmayanti juga berpendapat, bahwa efisiensi merupakan ukuran atau tingkat pemanfaatan sumber daya dalam suatu prosedur kerja. Semakin ekonomis atau sedikit sumber daya yang digunakan, maka semakin efisien pula prosesnya. Proses yang efisien ditandai dengan memperbaiki yang menjadikannya lebih terjangkau dan

²⁵Womsiwor, Rofingatun, dan Allolayuk, "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Pada Satuan Pendidikan Dasar di Distrik Demta Kabupaten Jayapura)," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, Vol 15 No 1 hal 2.

²⁶Elisabet, "Analisis Efisiensi Dan Produktifitas Tenaga Kerja Industri Tepung Terigu Di Indonesia Periode 1997-2008," hal 3.

cepat.²⁷ Menurut Hanifah, semakin efisien sistem pendidikan, maka semakin juga berkurang biaya yang diperlukan untuk mencapai tujuan- tujuannya.²⁸ Dengan demikian, efisiensi adalah hubungan antara apa yang sudah dituntaskan dengan baik dan tepat.

Jadi, Peneliti menyimpulkan bahwa efisiensi merupakan hubungan atau perbandingan output dengan input dari suatu kegiatan dengan meminimalisir penggunaan sumber daya dan memaksimalkan ketepatan sehingga menghasilkan hasil kegiatan yang optimal.

b. Pengukuran Efisiensi Dana

Pengukuran efisiensi ialah menentukan bagaimana sistem operasi kegiatan dapat memaksimalkan output sekaligus meminimalkan biaya. Konsep pengukuran efisiensi menurut Sherman dan Zhu dalam Othman et al. menjelaskan bahwa efisiensi yaitu terbagi atas empat jenis yaitu:

1) Technical efficiency (TE)

Merupakan efisiensi keseluruhan yang mengukur kemampuan untuk menghasilkan keluaran nyata lebih minim masukan, atau lebih kurang sumber daya dana yang dimanfaatkan yang menunjukkan efisiensi yang lebih besar.

2) Scale efficiency (SE)

²⁷Hayuning Rizki Mahardita, "Efektivitas Dan Efisiensi Kerja Aparatur Sipil Negara Di Sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Timur" 5 (2017): hal 3.

²⁸Siska Yulia Weny dkk., "Implementasi Manajemen Pembiayaan Di SMAN 8 Kediri : Analisis Perencanaan, Pencairan, Pelaksanaan Dan Evaluasi Pembiayaan" Vol 3 No.2 (2024): hal 2.

Berfokus pada tingkat ukuran operasi kegiatan yang maksimal dimana inefisiensi dapat terjadi ketika barang atau jasa yang dibuat pada tingkat diatas atau di bawah tingkat optimal, sehingga tambahan dana tetap.

3) Price efficiency (PE)

Dimana dapat meningkatkan efisiensi jika masukan produksi (sumber daya manusia dan dana) dapat dibeli dengan harga yang lebih terjangkau tanpa mengurangi kualitas

4) Allocative efficiency (AE)

Mengukur kombinasi maksimal dari beberapa input guna menghasilkan suatu produk atau layanan, seperti menggabungkan mesin anjungan tunai mandiri (ATM) dan perbaikan online untuk menukar tenaga modal kerja guna meningkatkan efisiensi.²⁹

c. Prinsip-Prinsip Efisiensi Dana

Suatu program kegiatan dalam lembaga atau instansi dapat dikatakan efisien atau tidak, maka harus memiliki prinsip-prinsip efisiensi yang harus dipenuhi, yaitu di antaranya :

1) Efisiensi harus dapat di ukur

Patokan antara efisien dan tidak efisien yaitu pengukuran yang normal. Tingkatan normal tersebut ialah titik acuan awal, untuk menentukan apakah program kegiatan tersebut efisien atau tidak. Pengorbanan mempunyai batas besaran normal, yaitu perjuangan yang maksimal untuk produksi yang optimal. Jika tidak

²⁹Marsondang Aron, "Pengukuran Efisiensi Serta Analisis Faktor Internal dan Eksternal Bank yang Memengaruhinya," *Jurnal Manajemen dan Organisasi*, Vol 10 No 1 hal 3.

bisa diukur, maka tidak bisa diketahui apakah suatu kegiatan tersebut dapat dikatakan efisien atau tidak.

2) Efisiensi mengacu pada pertimbangan rasional

Efisiensi mengacu pada pertimbangan berdasarkan akal sehat, nalar dan logis bukan dari emosional. Dengan pertimbangan yang masuk akal ini, objektivitas pengukuran dan evaluasi dapat dihindari semaksimal mungkin.

3) Efisiensi tidak boleh meninggalkan kualitas (mutu)

Kualitas harus senantiasa dijaga dengan baik. Dengan begitu, jumlah produk dapat saja ditingkatkan, namun tidak sampai menghilangkan kualitasnya. Prinsip hanya mengejar jumlah dan membiarkan kualitas harus dihindari untuk menjaga agar kualitas kegiatan yang dihasilkan tetap terjaga walaupun dari segi proses efisiensi dapat ditingkatkan. Jadi, jangan sampai hanya mengejar kuantitas produk, tetapi juga harus meningkatkan kualitas agar dapat tercapai hasil yang ingin dicapai.

4) Efisiensi merupakan teknis pelaksanaan

Artinya, pelaksanaan efisiensi dana jangan sampai melanggar prosedur yang telah ditetapkan. Karena, prosedur yang ditentukan tentunya sudah melihat dari berbagai aspek. Hal tersebut bertujuan agar dapat terhindar dari pemborosan dan sampai bersimpangan dengan peraturan dari pihak atasan yang selalu terjadi sebelumnya.

- 5) Pelaksanaan Efisiensi harus di sesuaikan dengan kemampuan organisasi yang bersangkutan.

Dalam hal ini, pelaksanaannya harus disesuaikan dengan tersedianya sumber daya manusia, biaya, peralatan, dan lain-lain, yang dimiliki oleh suatu lembaga atau badan yang terkait dan peningkatannya harus maksimal. Setiap program kegiatan mempunyai karakteristik yang tidak selalu sama. Pengukuran Efisiensi ini harus didasarkan pada tingkat kapasitas atau ketersediaan sumber daya, aset dan peralatan.³⁰

- 6) Efisiensi memiliki tingkatan

Pengukuran efisiensi dapat dinyatakan dalam hitungan angka persentase (%). Selain itu, ukuran efisiensi sistem juga dapat dinyatakan dengan berbagai pernyataan seperti; tidak efisien, kurang efisien, efisien, lebih efisien, dan paling efisien (optimal).

B. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

1. Pengelolaan Dana

a. Definisi Pengelolaan Dana

Pengelolaan atau manajemen berasal dari kata administrasi atau manajemen. *Management* dapat diterjemahkan ke dalam Bahasa Indonesia sebagai manajemen atau pengelolaan. Di pengertiannya keduanya memiliki arti yang sama, yaitu artinya “*to control*” yang berarti mengatur dan memerintah. Kata “manajemen”

³⁰Wardah, “Analisis Tingkat Efektivitas Dan Efisiensi Penggunaan Dana Desa Pada Masa Pandemi COVID 19 Di Desa Se-Kecamatan Sukorejo,” hal 32.

bisa disamakan dengan administrasi, yang juga berarti pengelolaan. Pengelolaan atau manajemen dapat diartikan sebagai kinerja atau upaya yang dilakukan sekumpulan anggota guna tercapai tujuan yang diinginkan. Pengelolaan juga dapat diartikan sebagai serangkaian kerja atau upaya yang berfokus untuk mencari dan menggunakan semua potensi yang dimiliki dengan efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Pengelolaan dana secara syariah adalah proses pengelolaan sumber daya keuangan lembaga pendidikan dengan cara mengelola dana secara efektif dan efisien.³¹

Hasibuan juga mendefinisikan pengelolaan atau manajemen sebagai ilmu sekaligus seni yang mengelola pemanfaatan sumber daya manusia dan sebagainya secara efektif dan efisien untuk mencapai tujuan tertentu. Kemudian, Herson juga mendefinisikan pengelolaan atau manajemen sebagai suatu proses sistematis guna mencapai tujuan dengan perencanaan yang tepat, pengarahan dan pemanfaatan yang maksimal agar seluruh tujuan yang dimaksudkan dapat tercapai secara efektif dan efisien.³²

NKRI menyatakan bahwa manajemen dana ditetapkan setiap tahun dalam satu Undang-Undang mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Pengelolaan mencakup perencanaan, penyelenggaraan dan pengendalian oleh APBN dengan berpusat

³¹Womsiwor, Rofingatun, dan Allolayuk, "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) (Studi Pada Satuan Pendidikan Dasar di Distrik Demta Kabupaten Jayapura)," *Jurnal Akuntansi dan Keuangan Daerah*, Vol 15 No 1, hal 2.

³²Risbon Sianturi dkk., "Konsep Standar Dan Ruang Lingkup Pendidikan" *Jurnal Pendidikan Anak Usia Dini*, Vol 6, no. 2 (2022): hal 5.

pada aspek pengorganisasiannya. Unsur-unsur APBN terdiri dari biaya rutin (pendapatan dan belanja rutin), dan anggaran pembangunan (pendapatan dan belanja pembangunan). Dana harus dikelola dengan baik dan efektif mulai dari penganggaran, perencanaan, pemanfaatan hingga pengendalian dan pelaporan agar sesuai dengan ketentuan yang berlaku supaya seluruh biaya dapat dipergunakan secara efektif dan efisien, menghapus kebocoran dan tidak ada penyimpangan.³³

Jadi, Peneliti menyimpulkan bahwa pengelolaan dana memiliki pengertian yaitu kegiatan menyusun, merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi serta mempertanggungjawabkan anggaran atau dana lembaga sesuai dengan yang ditetapkan untuk mencapai sebuah tujuan organisasi atau lembaga pendidikan.

b. Unsur-Unsur Pengelolaan Dana

1) Fleksibel

Fleksibel artinya adalah tidak kaku atau luwes. Menurut Dr Imam Suprayogo, fleksibel yaitu berani mengambil keputusan dalam segala sesuatu yang menyimpang dengan intruksi formal dari atasan. Maka dari itu, guna meningkatkan inovasi para pimpinan lembaga pendidikan, maka diperlukan pengembangan penilaian yang tidak cukup berorientasi pada proses namun juga

³³Nurhayati, "Efektivitas Pengelolaan Dana Biaya Operasional Sekolah Tahun 2019 Di UPTD SD 84 ParePare (Analisis Manajemen Keuangan Syariah)," hal 34.

penilaian yang dapat dicapai serta dimengerti. Jika sudut pandang ini dimengerti, maka kemampuan pimpinan pendidikan tidak bisa diukur dari kegiatan yang ada saja, namun juga seberapa berhasil apa penyelenggaraan kegiatan tersebut dapat memberikan hasil-hasil yang dikehendaki dari berbagai pihak.

2) Terbuka

Keterbukaan yang dimaksud bukan sekedar keterbukaan dalam pemberian sebuah data atau informasi, tetapi juga kemampuan menerima masukan atau pendapat dari pihak lain, sehingga menghasilkan peluang bagi seluruh pihak guna meningkatkan diri sesuai dengan kemampuannya. Misalnya, kepala sekolah memiliki wewenang untuk mempengaruhi kinerja sekolah lewat kepemimpinan dan komunikasinya serta sekolah yang sukses menyelenggarakan pertemuan rutin. Kepala sekolah juga harus tahu bagaimana memberi, menerima dan meminta saran dari staff sekolah dan tidak mengerjakan tugasnya sendirian.

3) Kooperatif Dan Partisipatif

Tugas-tugas pendidikan harus diselesaikan dengan kerjasama dan kooperatif. Oleh karena itu, pengelolaan pendidikan harus dilaksanakan dengan kooperatif dan partisipatif karena tidak ada jalan keluar dari berbagai kendala. Untuk tercapainya tujuan pendidikan seperti yang diharapkan, diperlukan pemimpin atau pengelola yang handal dan mampu

merencanakan, mengorganisasikan, menggerakkan dan mengendalikan dengan baik serta memahami kekuatan, kekurangan, kesempatan atau peluang dan ancaman.³⁴

c. Prinsip-Prinsip Pengelolaan Dana

Prinsip-Prinsip dalam pengelolaan dana di suatu lembaga pendidikan tertuang dalam Undang-Undang No. 20 Tahun 2003 mengenai Sistem Pendidikan Nasional pasal 48, yang menjelaskan bahwa pengelolaan biaya pendidikan memiliki beberapa prinsip-prinsip yaitu sebagai berikut:

1) Transparasi

Prinsip transparansi dalam pengelolaan dana pendidikan memiliki arti yaitu terdapat keterbukaan dalam proses pengelolaan suatu lembaga pendidikan, seperti dalam aspek anggaran di sebuah lembaga pendidikan. Mengkomunikasikan sumber dan jumlah dana, rincian penggunaan dan tanggung jawab akan mempermudah pihak-pihak yang terlibat untuk mengetahuinya. Transparasi dana atau pembiayaan sangat diperlukan untuk mengembangkan dukungan atau kontribusi dari orang tua, masyarakat dan Negara dalam pelaksanaan rencana penyelenggaraan semua program kegiatan di lembaga pendidikan.

³⁴Ibid, hal 35-36.

2) Akuntabilitas

Dalam manajemen, akuntabilitas dana pendidikan menurut Puarada yaitu pemanfaatan biaya lembaga pendidikan dengan bisa mempertanggungjawabkan selaras dengan rencana awal yang sudah ditentukan dan kebijakan yang masih berjalan. Adanya akuntabilitas dalam pengelolaan dana bertujuan mengevaluasi kemampuan lembaga pendidikan dan kepuasan stakeholder terhadap layanan pendidikan yang dilaksanakan guna mempertanggungjawabkan komitmen penyelenggara pendidikan atas biaya yang diterima dari Pemerintah, masyarakat dan wali siswa.

3) Efektivitas

Efektivitas menjadi tolak ukur yang amat menentukan keberhasilan pengelolaan biaya lembaga pendidikan. Pengelolaan sumber dana pendidikan dapat dikatakan efektif, apabila dimungkinkan untuk mengarahkan pendanaan untuk mendanai operasional sesuai dengan perencanaan yang telah ditentukan, guna mencapai tujuan serta meningkatkan mutu lembaga pendidikan. Efektivitas pengelolaan dana dapat ditinjau dari kualitas operasional program yang didanai, keakuratan pendanaan, kepuasan pendanaan, fleksibilitas proses pendanaan, adaptasi terhadap peraturan dan kebijakan yang memungkinkan diperolehnya dana sebanyak-banyaknya, tepat waktu dan tepat guna dalam meningkatkan mutu lembaga pendidikan.

4) Efisiensi

Efisiensi dalam pengelolaan dana mempunyai keterkaitan dengan pengembangan sumber daya pendidikan yang terbatas sehingga dapat tercapai hasil yang maksimal. Sumber daya yang dimaksudkan yaitu mencakup teknis, pikiran, waktu dan dana yang digunakan. Efisiensi pengelolaan dana juga berkenaan dengan banyaknya program kegiatan yang didanai dengan kebutuhan yang diperlukan. Efisiensi pengelolaan dana pendidikan adalah perbandingan antara masukan dan keluaran, pekerjaan dengan hasil, pengeluaran dan penerimaan serta dana dengan kenikmatan yang diperoleh darinya.³⁵

2. Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

a. Definisi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Bantuan Operasional Sekolah (BOS) ialah program atau kebijakan dari Pemerintah yang memberikan dana operasional kepada satuan pendidikan dasar untuk penyelenggaraan program Wajib Belajar. Sesuai dengan peraturan Pemerintah Republik Indonesia No.48 Tahun 2008 mengenai pembiayaan pendidikan, biaya non pribadi meliputi uang bahan atau fasilitas pendidikan langsung dan biaya tak langsung yang berupa, air, jasa, telekomunikasi, pemeliharaan sarana dan prasarana, lembur,

³⁵ Arwildayanto, *Manajemen Keuangan Dan Pembiayaan Pendidikan* (Gorontalo: Widya Padjajaran, 2017), hal 20-24.

transportasi, tunjangan, konsumsi, pajak asuransi dan lain-lain,³⁶ Dana BOSP juga dapat dijelaskan sebagai bantuan dari Pemerintah Pusat terhadap seluruh sekolah dan lokasi kegiatan belajar mandiri baik negeri maupun swasta di semua daerah di Indonesia.³⁷

Menurut peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2018, Bantuan Operasional Sekolah merupakan program Pemerintah untuk membiayai biaya operasional non pribadi bagi satuan pendidikan. BOS merupakan suatu program keuangan khusus dari Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) yang ditujukan bagi sekolah atau madrasah diseluruh Indonesia dan pada dasarnya merupakan penyedia dana dan biaya operasi bagi lembaga pendidikan dengan tujuan pelaksanaan pendidikan.

Selaras dengan peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan No 26 Tahun 2017 yang mengatur tentang arahan teknis pengelolaan dana Bantuan Operasional Sekolah. BOSP dikelola oleh SD/SDLB/SMP/SMPLB/SMALB/SMK dan SLB melalui penerapan Manajemen Berbasis Sekolah (MBS), yang memberikan kebebasan untuk merencanakan, mengelola dan memantau program yang disesuaikan dengan keadaan dan kebutuhan sekolah. Pemanfaatan BOS hanya diperuntukkan untuk

³⁶Ahmad Rizalluddin, Thomas Nadeak, dan Devi Astriani, "Analisis Efisiensi Dan Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Pada SDN Teluk Bango VI Desa Gongcai Kecamatan Batujaya Kabupaten Karawang" *Jurnal Mahasiswa Manajemen dan Akuntansi*, 2, no. 4 (2023): hal 3.

³⁷Depniliza Depiani, "Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)" *Jurnal Manajer Pendidikan*, Volume 9, Nomor 2 (2013): hal 1.

peningkatan pelayanan pendidikan dan tidak mengakibatkan campur tangan dari pihak manapun.

b. Tujuan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Secara keseluruhan, program dana BOS bertujuan untuk meringankan beban masyarakat dalam membiayai program wajib belajar 9 tahun yang berkualitas dan merupakan peluang yang sangat baik untuk menjadi mempercepat penyelesaian program wajib belajar 9 tahun. Hal ini berkenaan dengan pemerataan pendidikan bagi semua warga negara tanpa terkecuali, sehingga semua warga mempunyai kesempatan untuk merasakan pendidikan. Adapun secara khusus program dana BOS bertujuan untuk:

- 1) Membantu mendanai biaya operasional non personil sekolah, namun dana BOS juga tetap digunakan untuk mendanai para staff.
- 2) Pembebasan biaya bagi seluruh siswa SD/SDLB negeri dan SMP/SMPLB/SMPT (terbuka) dari biaya operasional sekolah kecuali pada sekolah bertaraf internasional (RSBI) dan sekolah bertaraf internasional (SBI).
- 3) Membebaskan semua siswa kurang mampu dari segala bentuk pungutan, baik negeri maupun swasta.
- 4) Untuk meringankan beban biaya operasional sekolah bagi siswa di sekolah swasta.³⁸

³⁸Hawati, "Efektivitas Penggunaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Untuk Menunjang Sarana Dan Prasarana Pendidikan," hal 21.

c. Indikator-Indikator Pengelolaan Bantuan Operasional Sekolah

1) Planning (Perencanaan)

Widjaya menyatakan bahwa perencanaan merupakan kegiatan utama yang harus dilaksanakan dalam proses manajemen. Rencana ialah rangkaian keputusan yang mengarahkan pelaksanaan kegiatan dimasa yang akan datang. Perencanaan yang baik harus mempunyai tujuan. Rencana yang jelas adalah:

- (a) Apa yang akan dicapai mengacu pada penetapan tujuan.
- (b) Ada alasan mengapa hal tersebut harus dilakukan.
- (c) Cara penyelenggarannya ditinjau dari metode kerja dan biaya.
- (d) Cara pelaksanaannya mengacu pada perencanaan kegiatan kerja atau akhir kegiatan.
- (e) Siapapun yang melaksanakannya, sepakat dengan pihak-pihak yang berkontribusi dalam pelaksanaan kegiatan, berkenan dengan kegiatan mana yang sudah dilaksanakan dan yang akan di selesaikan.
- (f) Seberapa besar kemungkinan yang dapat memengaruhi pelaksanaan dan kegiatan, sehingga dilakukannya revisi atau perubahan sesuai rencana.

2) Organizing (Pengorganisasian)

Selanjutnya perlu mempersiapkan atau mendistribusikan tugas-tugas yang telah ditetapkan yang akan dilaksanakan sebagai masuka dari kegiatan. Langkah ini memerlukan pengorganisasian, karena terdapat beberapa kegiatan yang kemudian dikelompokan

berdasarkan hubungan atau jenis masing-masing kelompok. Menurut Widjaya, kegiatan pengelompokan juga berarti mengelompokkan tanggung jawab, membagi tugas dan mengatur setiap bagian dengan tugas tertentu.

3) Aktuating (Pengarahan)

Menurut Nurjaka, aktuating merupakan kegiatan yang menjamin seluruh kelompok untuk bersedia bekerja dengan suasana hati yang gembira dalam menyelesaikan tugasnya. Disamping itu juga, Widjaya menjelaskan kegiatan yang menjadi pedoman dalam pelaksanaan atau pengarahan adalah:

- (a) Memberikan pengertian, pemaparan, informasi mengenai hubungan keseluruhan dengan tujuan yang ingin dicapai.
- (b) Memunculkan peraturan, pedoman, ketentuan, dan petunjuk pelaksanaan kegiatan yang baik.
- (c) Memberikan contoh pekerjaan dan menunjukkan sikap yang baik.
- (d) Mengadakan pengawasan.
- (e) Mengungkapkan kelebihan dan kebutuhan atau kekurangan dalam pekerjaannya.
- (f) Memperbaiki kekurangan atau kelemahan serta mengatasi hambatan-hambatan yang ada.

4) Controlling (Pengawasan)

Menurut Nurjaka pengawasan merupakan proses dimana seseorang mengetahui pekerjaan yang telah dilakukan,

mengevaluasinya dan bila perlu mengoreksinya agar pelaksanaannya sesuai dengan rencana.

5) Evaluasi (Penilaian)

Evaluasi merupakan usaha mengukur pelaksanaan kegiatan dan upaya memperoleh informasi dari hasil pemantauan atau sumber lainnya. Penilaian yang dimaksud adalah sebagai berikut:

- (a) Apakah program tersebut perlu disempurnakan atau ditingkatkan.
- (b) Apakah sudah sesuai dengan tujuan atau sasaran dan apakah pekerjaan berjalan sesuai dengan jadwal.³⁹

d. Pemanfaatan Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS)

Pemanfaatan pengelolaan dana BOS pada sekolah atau Madrasah negeri harus membutuhkan persetujuan dan keputusan dari Kepala Sekolah, Guru dan Komite Sekolah atau Madrasah, yang harus disebutkan sebagai salah satu sumber pendapatan dalam RAPBS. Menurut Kemendiknas Tahun (2010), pemanfaatan dana BOS ditujukan untuk:

- 1) Pembiayaan segala kegiatan yang berkaitan dengan penerimaan peserta didik baru seperti anggaran pendaftaran, penggandaan formulir, administrasi pendaftaran dan pendaftaran ulang.

³⁹Al Ma'Ruf, "Efektivitas Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) Dalam Meningkatkan Sarana Dan Prasarana Pendidikn (Studi Di SDN 44 Mande Kota Bima)," *AL MA*, 2019, hal 56.

- 2) Pembelian buku pelajaran dan buku rujukan untuk dikumpulkan dan disimpan di perpustakaan.
- 3) Pembelian bahan habis pakai seperti buku catatan, kapur tulis, pensil, buku kerja siswa, buku inventaris, gula pasir, kopi dan teh untuk kebutuhan sekolah sehari-hari.
- 4) Mendanai peralatan komunikasi (elektronik) seperti komputer dan layar LCD serta mendanai kegiatan kesiswaan seperti program remedial, olahraga, kesenian, penelitian remaja, pramuka, Palang Merah Remaja dan lain-lain.
- 5) Pendanaan untuk ulangan harian, ujian sekolah dan laporan prestasi siswa.
- 6) Pengembangan profesi guru misalnya, pelatihan, workshop, KKG/MGMP dan KKKS/MKKS.
- 7) Pembiayaan pemeliharaan sekolah seperti pengecatan, perbaikan fasilitas yang bocor, perbaikan pintu dan jendela, perbaikan kursi dan meja serta perawatan lainnya.
- 8) Pembiayaan langganan daya dan jasa misalnya listrik, air, telepon, begitu pula fasilitas baru jika sudah ada jaringan di sekitar sekolah.
- 9) Gaji Guru dan staff pengajar honorer yang tidak dibayar oleh Pemerintah Negara atau Provinsi serta tunjangan tambahan yang meningkatkan kesejahteraan Guru yang ditanggung oleh Pemerintah Daerah.

- 10) Pembiayaan untuk pengelolaan dana BOS seperti alat tulis, fotokopi, surat menyurat dan pelaporan.⁴⁰

e. Manfaat Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Dana Bantuan Operasional Sekolah

Dalam rangka mencapai manfaat-manfaat dari efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana BOS, penting untuk memiliki perencanaan, pemantauan dan evaluasi yang baik dalam pengelolaan dana BOS serta menjalankan praktik-praktik kerja yang baik. Berikut adalah manfaat dari adanya efektivitas dan efisiensi pengelolaan dana BOS, antara lain:

- 1) Penggunaan sumber daya yang lebih baik dan tepat

Dengan berfokus pada efisiensi, sekolah dan lembaga pendidikan akan dapat memanfaatkan dana BOS dengan lebih baik, dapat meminimalkan pemborosan dan mengalokasikan sumber daya ke area yang lebih dibutuhkan atau diprioritaskan.

- 2) Peningkatan kualitas dan mutu pendidikan

Dengan menggunakan efektivitas dalam mengelola dana BOS akan dapat berdampak langsung terhadap kualitas pendidikan. Dana yang digunakan dengan bijak dapat digunakan untuk meningkatkan fasilitas, sumber daya pembelajaran, pelatihan guru dan semua yang mendukung peningkatan kualitas pendidikan.

⁴⁰Larang, "Efektivitas Pemanfaatan Dana Bantuan Operasional Sekolah Dalam Pengadaan Fasilitas Sekolah Di Madrasah Tsanawiyah Muhammadiyah Kalosi Kabupaten Enrekang," hal 38-39.

3) Meningkatkan akuntabilitas

Mengelola dana BOS dengan efektif dan efisien dapat membantu menciptakan tingkat akuntabilitas yang lebih tinggi. Hal ini dapat melibatkan pelaporan keuangan secara transparan dan terbuka serta pemantauan yang ketat terhadap bagaimana dana tersebut dipergunakan.

4) Pembangunan berkelanjutan

Dengan mengelola dana BOS secara efektif, lembaga pendidikan akan dapat menghindari dan meminimalisir defisit anggaran serta memastikan kelangsungan kegiatan operasional yang berkelanjutan.

5) Peningkatan kepercayaan masyarakat

Pengelolaan dana BOS yang efektif dan efisien, akan dapat membangun kepercayaan kepada masyarakat dalam sistem pendidikan dan pemerintah serta dapat mendukung pengembangan pendidikan yang lebih baik.

6) Pencapaian sasaran dan tujuan yang jelas

Kita harus memikirkan bagaimana memanfaatkan uang tersebut dengan sebaik-baiknya, sehingga pelayanan kesejahteraan dapat ditingkatkan semaksimal mungkin demi kepentingan institusi dan masyarakat. Maka dari itu, dalam menyusun anggaran atau dana BOS harus memperhatikan efisiensi alokasi dan efektivitas operasional untuk mencapai tujuan dan sasaran yang jelas.⁴¹

⁴¹Anton Trianto, "Analisis Efektivitas Dan Efisiensi Pengelolaan Keuangan Daerah Di Kota Palembang" Vol 1. No 2 (2016): hal 4.